

---

**PENGUATAN PERILAKU KREATIF MELALUI BIMBINGAN LANJUT BAGI KELUARGA  
PENGEMIS DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

Oleh

Taufik Hidayat Eko Yudianto

Universitas Negeri Semarang, Pascasarjana Jl Kelud Utara III, Semarang 50237,  
Indonesia

Email: [mr77vick@students.unnes.ac.id](mailto:mr77vick@students.unnes.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 05-10-2022

Revised: 17-11-2022

Accepted: 21-11-2022

**Keywords:**

COVID-19, Sosial-ekonomi,  
Kemiskinan, Perilaku  
Kreatif, Pengemis

**Abstract:** *The Coronavirus 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi global yang tidak hanya menyebabkan infeksi dan kematian, tetapi juga menimbulkan kekacauan ekonomi global. Angka kemiskinan mengalami kenaikan yang tidak hanya dirasakan di Indonesia saja namun hampir di seluruh penjuru dunia. Akibatnya kegiatan mengemis banyak dijadikan sebagai pilihan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat miskin. Tulisan ini akan memotret penguatan perilaku kreatif melalui bimbingan lanjut bagi keluarga pengemis di tengah pandemi covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka pengemis di Indonesia. Model-model penanganan yang diterapkan seperti model preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut dirasa masih kurang dalam aplikasi sehingga para pengemis yang terjaring kerap berhenti pada fase tertentu dan masih ada yang kembali ke kebiasaan mengemisnya. Bimbingan lanjut dalam penanganan pengemis menjadi penentu agar pengemis tidak kembali ke jalan. Bimbingan lanjut yang erat kaitannya dengan penguatan perilaku kreatif merupakan sarana edukatif yang bisa merubah pola hidup para pengemis. Maka dari itu pemerintah perlu menekankan fase bimbingan lanjut tersebut agar keluarga pengemis dapan menopang kebutuhan mereka dengan kreatifitas yang didapat dari bimbingan dan pelatihan yang mereka dapatkan secara *continue*.*

---

**PENDAHULUAN**

Bermula dari kota Wuhan di Tiongkok, virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 di mana-mana. Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan karena hanya ada beberapa penyakit saja sepanjang sejarah yang digolongkan sebagai pandemi. Bagi masyarakat Indonesia kaitannya dengan mengatasi pandemi COVID-19, terjadi fenomena yang bertentangan atau gap dalam permasalahan ini

yaitu disatu sisi pemerintah mengkampanyekan gotong royong dalam penanganan COVID-19 dengan cara menghimbau agar masyarakat menjaga jarak dan interaksi sosial (*social distancing*), di sisi lain masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki budaya berkumpul, berinteraksi sosial dan bekerja sama antar individunya. Interaksi sosial yang tinggi tersebut menjadi budaya masyarakat Indonesia tidak lain karena faktor ekonomi.

Pandemi global *The Coronavirus 2019 (COVID-19)* tidak hanya menyebabkan infeksi dan kematian, tetapi juga menimbulkan kekacauan ekonomi global dalam skala yang tidak terlihat dan berpotensi menghancurkan kehidupan individu, bisnis, industri, dan seluruh ekonomi (Laing, 2020). Hal ini menjadi pukulan besar bagi masyarakat Indonesia jika mereka harus diam di rumah. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa wabah penyakit memiliki andil besar dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat kita. Penerapan *social distancing* yang berlawanan dengan budaya masyarakat kita tidak bisa menjamin penurunan angka positif COVID-19, apalagi dengan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri terkenal kental akan interaksi sosial yang tinggi. Mereka tidak bisa diam di rumah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain banyak perusahaan yang justru merumahkan karyawannya. Pandemi ini menjadi pukulan besar bagi masyarakat Indonesia khususnya di bidang ekonomi.

Data terbaru tingkat kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan angka kemiskinan pada fase pandemi ini berdampak pada semakin maraknya pengemis dan anak jalanan. Banyak usaha dari pemerintah ataupun lembaga sosial lainnya untuk menuntaskan masalah pengemis dengan cara membuka lapangan kerja, menyediakan sarana pendidikan, dan memberikan pelatihan-pelatihan. Namun amat sangat disayangkan banyak yang bersikukuh terhadap kebiasaan lamanya sebagai pengemis, dengan alasan mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Patel, 2017). Apalagi di tengah pandemi covid-19, tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan kondisi sekarang ini agar mendapatkan segala macam bantuan (meski hanya sekedar makan dan sembako).

Pengemis mewakili tantangan moral bagi masyarakat kita. Memberi atau tidak memberi uang untuk pengemis telah menjadi dilema. Itu mewakili pertanyaan etis harian dan mendasar tidak hanya untuk warga negara dan pemerintah negara-negara berkembang, tetapi juga bagi negara-negara maju (Jordan, 1999; Lynch, 2005). Banyak latar belakang kenapa menjadi pengemis menjadi salah satu profesi yang dipilih. Budaya dan agama adalah indeks atau penentu yang jelas dari semua sikap, bersama dengan faktor penentu lain seperti kepribadian individu, latar belakang rumah (mengemis sebagai profesi rumah tangga di beberapa komunitas), dan situasi ekonomi (Esan, 2009). Masalah mengemis perlu ditangani dari tingkat akar rumput dan semua bagian masyarakat harus berkontribusi padanya, baik itu pemerintah pusat atau negara bagian atau LSM, organisasi. Memberikan pendidikan dan menciptakan lapangan kerja untuk orang yang tidak mampu bisa menjadi solusi yang menjanjikan untuk masalah ini (Malik, 2012). Apalagi dalam realitanya pengemis terdiri dari dua jenis yaitu berdasarkan kondisi ekonomi rendah atau miskin dan mereka yang berasal dari non miskin atau ekonomi cukup (Karacoskun, 2009). Ini selalu menjadi tugas dan kewajiban besar bagi seluruh anggota masyarakat, lembaga sosial, dan juga pemerintah dalam menindaklanjuti fenomena mengemis di lingkungan kita.

Oleh karena itu tulisan ini akan memotret penguatan perilaku kreatif keluarga penggemar di tengah pandemi covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

## PEMBAHASAN

### Fenomena COVID-19 dalam Perspektif Sosial Ekonomi di Indonesia

Indonesia Negara yang *bhinneka* dari berbagai aspek, misalnya segi etnik, adat istiadat, kepercayaan yang perlu dihormati eksistensinya dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk (*Plural Societies*). JS Furnivall menjelaskan masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sehari-hari tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik (Nurhadiantomo, 2004: 34). Indonesia juga merupakan Negara dengan populasi tertinggi ke-4 dunia yang memiliki latar belakang sosiokultural gotong royong dan interaksi sosial tinggi dalam kehidupan masyarakatnya.

Tylor dalam H.A.R Tilaar (2002: 7) telah memberikan pandangan bahwa tiga pengertian manusia, masyarakat dan budaya sebagai tiga dimensi dari hal yang bersamaan. Dapat disimpulkan bahwa setiap manusia di dunia ini mempunyai budaya, dan setiap budaya pada kelompok masyarakat adalah bervariasi antara satu dan lainnya. Selain itu Tylor juga berpendapat bahwa budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Tilaar, 2002: 39). Tidak heran jika masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong dan interaksi sosial yang tinggi. Ditambah lagi bahwa aktivitas manusia terjadi dalam konteks budaya, dimediasi oleh bahasa dan sistem simbol lainnya, dan dapat dipahami dengan baik ketika diselidiki dalam perkembangan historis mereka (John-Steiner & Mahn, 1996).

Globalisasi pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya akan melemparkan banyak orang ke dalam resesi dan kemungkinan depresi ekonomi (Barua, 2020). Hal tersebut menjadi masalah yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Karena faktor ini pula *social distancing* tidak dapat terlaksana dengan baik karena masyarakat Indonesia harus pergi ke luar rumah demi memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa masyarakat Indonesia sulit untuk melakukan perubahan sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Shahab, K. (2007:5) menyebutkan ada empat hal yang biasanya terjadi dalam suatu masyarakat lama menurut teori perubahan sosial, yaitu: (1) adanya deprivasi relatif, yakni suatu perasaan tersisihkan dari orang lain dan kalangan tertentu yang baru masuk dalam kehidupan masyarakat; (2) adanya dislokasi, yaitu perasaan tidak punya tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang; (3) adanya disorientasi, yaitu perasaan seperti tidak punya pegangan hidup akibat tidak ada lagi yang bisa dipertahankan; (4) negativisme, yaitu perasaan yang mendorong ke arah pandangan serba negatif kepada tatanan yang baru berkembang, dengan sikap tidak percaya, curiga, bermusuhan dan melawan. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia tidak mau mengambil resiko kaitannya dalam hal mencukupi kebutuhan perekonomian mereka dengan meninggalkan budaya lama demi melakukan budaya baru yaitu sosial distancing. Karena banyak masyarakat Indonesia yang dituntut meninggalkan pekerjaan mereka untuk melakukan *social distancing*.

Seorang Sosiolog Inggris, Herbert Spencer pernah mengatakan bahwa untuk bertahan

dalam kondisi yang berat atau kejam, manusia membutuhkan sikap egois untuk memungkinkannya bertahan hidup. Sikap egois memungkinkan "*the survival of the fittest*" (Koentjaraningrat, 1981: 137). Meskipun pandangan Spencer ini banyak juga dibantah oleh filsuf lain yang berpendapat bahwa manusia bertahan hidup dengan azas altruisme (mengutamakan kepentingan bersama), namun dengan kondisi masyarakat dalam pandemi COVID-19 ditambah dengan sistem kapitalistik saat ini, dimana hak kepemilikan pribadi sangat besar, pendapat Spencer lebih mungkin terjadi. Hal tersebut terbukti bahwa masyarakat Indonesia pada akhirnya akan bersifat egois dalam bertahan hidup mencari nafkah dan kebutuhannya meskipun harus berada ditengah pandemi COVID-19 dengan tidak mepedulikan bahwa dirinya akan tertular atau menularkan virus ini kepada orang lain. Parahnya ketika seseorang tidak mematuhi aturan atau norma sosial yang berlaku kaitannya dengan pencegahan virus ini seperti halnya dalam penggunaan masker ataupun mencuci tangan secara rutin.

Karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang sosiokultural saling bergotong royong dengan keintiman fisik dan interaksi sosial yang tinggi akan amat sulit bahkan mustahil dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan *social distancing*, di sisi lain penyebaran virus ini adalah dengan kontak dekat atau adanya interaksi sosial langsung sebagai cara penularannya. Indonesia dianggap memiliki budaya interaksi yang erat (keintiman fisik) dibandingkan dengan Jepang (mempertahankan jarak fisik secara budaya). Perilaku manusia mempertahankan atau tidak menjaga jarak fisik adalah hasil dari budaya suatu bangsa yang memiliki akar lebih dalam pada warisan dan tradisi nasional mereka (George, 2020). Setiap upaya untuk tiba-tiba mengubah perilaku untuk menghindari penyebaran virus ini akan menghadapi perlawanan dari orang-orang seperti yang ditunjukkan di beberapa Negara termasuk di Indonesia. Mengabaikan aturan dan norma sosial dari pemerintah adalah salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ini semakin rumit ketika ada kegagalan untuk memahami bahwa jarak fisik dalam konteks sosial tertentu tidak terjangkau bagi populasi besar berdasarkan keterlibatan mereka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan kondisi kerja mereka. Setiap upaya yang dilakukan dengan meremehkan perubahan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dapat dicapai dengan memanipulasi kesadaran individu tanpa mengubah konteks sosial akan selalu gagal total dalam hal membangun kesehatan masyarakat (George, 2020). Seharusnya para pembuat kebijakan yang merancang langkah-langkah pengendalian infeksi dalam pandemi COVID-19 memperhatikan norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat serta melakukan pertimbangan lebih lanjut untuk memastikan langkah-langkah yang diterapkan dapat diterima dan layak untuk masyarakat umum (Eng Koon, 2020).

Coronavirus baru (SARS-CoV-2, yang menyebabkan COVID-19) secara tidak proporsional mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Efeknya, banyak pekerja yang harus dirumahkan dan diberhentikan dari pekerjaannya demi menyelamatkan ekonomi perusahaan (Hailu, 2020). Berdasarkan studi terbaru ILO, sebanyak 1,25 miliar pekerja yang berada di sektor paling terdampak tersebut berisiko terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan upah serta jam kerja. Dikutip dari *thejakartapost.com*, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat memberhentikan pekerja sebagai respon terhadap pandemi coronavirus tetapi masih

membayar dividen dan membeli kembali saham yang menuai kritik dari serikat pekerja, penasihat dana pensiun, anggota parlemen dan pakar tata kelola perusahaan. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan data Kemnaker per 27 Mei 2020, pekerja sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja dan pekerja sektor formal yang ter-PHK 380.221 pekerja. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak 318.959 pekerja. Selain itu, terdapat 34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan serta 465 pemegang yang dipulangkan. Total pekerja yang terdampak pandemi COVID-19 sebanyak 1.792.108 pekerja di bulan Mei 2020. Hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut karena secara tidak langsung mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia.

Evolusi penyakit dan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini sangat tidak pasti sehingga menyulitkan para pembuat kebijakan untuk merumuskan respons kebijakan makroekonomi yang tepat (McKibben & Fernando, 2020). Beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi menyelamatkan nasib masyarakat Indonesia khususnya bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Untuk saat ini pemerintah tengah berfokus pada jaring pengaman sosial (JPS). Hal tersebut dilakukan berbarengan dengan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 yang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah telah melakukan pengetatan sosial, gerakan manusia dibatasi dan banyak sekali mereka yang kehilangan oportunitas penghasilan maka dari itu mau tidak mau pemerintah harus memberikan bantuan besar-besaran. Kemudian, untuk memastikan survivabilitas ekonomi, target yang dicanangkan pemerintah adalah agar perekonomian tidak mati dan tetap bertahan di tengah terpaan badai COVID-19. Maka dari itu, pemerintah mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama kebutuhan pokok masyarakat agar masyarakat segera bangkit, dan setelahnya bisa membangkitkan sektor pendidikan kembali, termasuk sektor pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Ketika pemerintah dirasa kurang efektif dalam mengurangi jumlah positif COVID-19 dengan *social distancing* dan PSBB (Pembatasan Sosial dalam Sekala Besar), akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan opsi norma sosial baru yaitu New Normal. New normal merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana implementasi skenario new normal dengan pertimbangan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Beberapa daerah menerapkan 5 level scoring dalam menangani keparahan pandemi, yaitu krisis, tingkat parah, substansial, sedang, dan rendah. Pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan new normal jika daerah mereka berada di tingkat moderat atau sedang.

Akhirnya, pencegahan dan pengurangan angka penularan COVID-19 dikembalikan lagi pada masyarakat atas dasar kesadaran individu. Sebagai generasi muda khususnya harusnya menjadi teladan dan sekaligus menjadikan diri sebagai media sosialisasi pencegahan penyebaran virus ini. Norma-norma yang ada harus dikonstruksi secara sosial dimana remaja atau generasi muda sangat sensitif dapat diubah, terutama melalui aksi bersama oleh para pemangku kepentingan sosial yang terlibat (Baril & Paquette, 2014). Pesan yang disampaikan oleh keluarga, teman sebaya, dan sekolah juga dapat membantu norma sosial berkembang. Saling mengingatkan dan menegur tentang norma sosial kaitannya dengan pencegahan COVID-19 adalah upaya sederhana yang dapat kita lakukan

demis mengantisipasi persebaran virus ini. Memang dapat disimpulkan bahwa semua akan kembali pada kesadaran individu. Namun sebagai bangsa Indonesia dengan latar belakang sosiokultural yang kental akan gotong royong hendaknya mampu bersatu melawan COVID-19 setidaknya dengan saling mengingatkan. Oleh karena itu integrasi sosial juga dibutuhkan dalam hal ini. Integrasi sosial didasari karena keberadaan kerja sama yang baik antara anggota masyarakat dan pada dasarnya Integrasi sosial merupakan proses pembagian untuk saling menerima kehidupan, mengingat dan bertindak dalam satu tatanan kehidupan sosial yang harmonis (Said, 2009: 18).

### **Kemiskinan Sebagai Dampak Pandemi Covid-19**

*The Coronavirus 2019 (COVID-19)* telah menjadi pandemi global yang tidak hanya menyebabkan infeksi dan kematian, tetapi juga menimbulkan kekacauan ekonomi global dalam skala yang tidak terlihat dan berpotensi menghancurkan kehidupan individu, bisnis, industri, dan seluruh ekonomi (Laing, 2020). Hal ini menjadi pukulan besar bagi masyarakat Indonesia jika mereka harus diam di rumah. Tren penurunan tingkat kemiskinan sejak September 2017 terpatahkan gara-gara pandemi virus Covid-19. Data terbaru tingkat kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan hal tersebut. Jika persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, per Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen. Besaran persentase ini bila ditampilkan dalam angka setara dengan penambahan 1,63 juta penduduk miskin sejak September 2017. Atau, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang.

Kenaikan penduduk miskin terakhir kali terjadi pada Maret 2017. Saat itu, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang atau naik 10,64 persen ketimbang September 2016. Namun, setelah Maret 2017 jumlah penduduk miskin menunjukkan tren penurunan. Hingga melonjak kembali pada Maret tahun ini. Bila kita tengok, awal Maret 2020 adalah kali pertama pemerintah mengumumkan keberadaan kasus Covid-19. Beberapa waktu kemudian, diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk sejumlah provinsi. Penularan virus korona dicegah dengan penjarakan sosial dan fisik agar korban jiwa tidak terus bertambah.

PSBB yang menjadi salah satu aturan pemerintah menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat. Pergerakan masyarakat terbatas, perekonomian pun melambat. Dampaknya dirasakan semua lapisan masyarakat. Namun, kelompok masyarakat kelas bawah terdampak paling tajam. Apalagi program bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19 belum digulirkan pada awal Maret. Program bantuan sosial baru diwujudkan pada April. Namun, dampak perlambatan roda perekonomian terus berjalan. Kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan pun meningkat. Per Maret 2020, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan perdesaan naik, dari posisi 1,50 poin pada September 2019, menjadi 1,61 poin. Indeks keparahan kemiskinan naik tipis dari 0,36 poin menjadi 0,38 poin. Disparitas kemiskinan di perkotaan dan perdesaan jadi makin lebar. Jumlah penduduk miskin di kota juga lebih banyak daripada di desa. Rasio gini per Maret 2020 naik tipis dari 0,38 pada September 2019 menjadi 0,381 per Maret 2020. DKI Jakarta tercatat paling tinggi peningkatan rasio gini. Rasio gini menggambarkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Angka tersebut menyimpulkan, Covid-19 menjadi penyebab angka kemiskinan meningkat. Sebab, episentrum penyebaran virus korona bermula dari Ibu Kota.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari *Republika.com*, Bank Dunia telah memprediksi bahwa pandemi Covid-19 dapat mendorong 71 juta orang ke jurang kemiskinan ekstrem pada 2020. Perkiraan ini berbasis pada proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi global tahun ini yang berkontraksi 5,2 persen. Artinya, tak hanya Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Baik data maupun proyeksi tentang kemiskinan ini menggambarkan tantangan berat upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Target tingkat kemiskinan tujuh persen pada 2024 menjadi tidak mudah. Percepatan pemulihan ekonomi pada 2021 merupakan keniscayaan.

### **Fenomena Mengemis di Tengah Pandemi Covid-19**

Angka kemiskinan pada fase pandemi ini secara logika meningkat, sehingga marak pengemis dan anak jalanan. Mengemis adalah praktik pilihan terakhir bagi banyak orang dan biasanya dianggap sebagai pilihan yang lebih dapat diterima untuk menyediakan kebutuhan dasar mereka daripada beralih ke kegiatan kriminal, seperti mengutil, pencurian, pengedaran narkoba, dan prostitusi (Stones, 2013). Tindakan mengemis umumnya ada di setiap periode sejarah (Karacoskun, 2009). Praktek mengemis merupakan masalah sosial, dimana mereka dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma-norma yang berlaku. Berbagai macam motif mengemis banyak dilakukan di kalangan masyarakat, salah satunya adalah sebagai pengemis jalanan. Pengemis jalanan adalah individu atau sekelompok orang yang meminta atau mencari nafkah dari jalanan dengan berinteraksi dengan orang lain untuk meminta uang, makanan, dan pakaian sebagai hadiah atau amal (Balarabe & Mahmoud, 2014). Biasanya pengemis jalanan ini sebagian besar tunawisma yang pada umumnya meminta uang di dekat tempat umum, pasar yang sibuk, stasiun,dll (Seyedalinaghi et al., 2013). Beberapa orang berlatih mengemis karena kemiskinan dan ketidakmampuan mereka untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan. Di sisi lain, orang berlatih mengemis untuk menerima penghasilan finansial secara sederhana, cara tanpa usaha, karena mereka melihatnya sebagai karier yang menguntungkan (Al-muhareb & Alzyoud, 2018).

Banyaknya pengemis menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merata. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya kondisi atau tata kehidupan baik secara material, spiritual dan sosial. Rendahnya kesejahteraan tersebut menimbulkan berbagai macam masalah sosial seperti pengemis, yang sering dikaitkan dengan kondisi kemiskinan. Hambatan individu dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya adalah salah satu faktor yang membuat kondisi semacam ini ada di Negara kita. Menurut Talcott Parsons, teori struktural fungsional diibaratkan seperti organ tubuh manusia yang memiliki fungsinya masing-masing dan dalam menjalankan fungsinya tersebut setiap organ bekerjasama dengan organ-organ lainnya agar terjadi keseimbangan. Hal inilah yang harusnya terjadi pada masyarakat kita, saling berinteraksi dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak timbul permasalahan-permasalahan sosial seperti keterpaksaan menjadi pengemis dalam menopang hidup.

### **Penguatan Perilaku Kreatif Melalui Bimbingan Lanjut Bagi Keluarga Pengemis**

Pengaturan model penanganan di Kabupaten Banyumas berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Model penanganan yang diterapkan yaitu model preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut. Meski terjadi perlawanan karena dirasa kurang memberikan solusi bagi rakyat miskin, namun pemerintah setempat terus berusaha agar

upaya penanggulangan pengemis dalam menuntaskan kemiskinan terus dilakukan. Selain keempat model penanganan tersebut, ada juga partisipasi masyarakat dalam bentuk aktif dan pasif.

Alasan penggunaan pengaturan mengenai model penanganan bagi PGOT di Kabupaten Banyumas melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dianggap efektif dalam mengurangi PGOT sehingga pengaturan tersebut dapat menciptakan suasana yang lebih tertib di Kabupaten Banyumas. Selain itu, melalui penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dapat mengubah Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang tidak produktif dibina menjadi produktif melalui pendidikan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas sesuai dengan konsep negara kesejahteraan dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”.

Kaitannya dengan pengemis yang terjaring razia, mereka akan mendapatkan *treatment* yang sama yaitu model penanganan preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut. Perlu ditekankan bahwa dalam fase bimbingan lanjut inilah yang menjadi titik tolak pengembangan kreatifitas dari para pengemis. Keluarga yang memang tidak memiliki pekerjaan lain selain mengemis akan mendapatkan bimbingan dan pelatihan. Pada titik inilah tugas dari pemerintah khususnya dalam penguatan perilaku kreatif keluarga pengemis.

Pada dasarnya sikap individu memiliki peranan penting menentukan bagaimana perilaku seseorang terhadap lingkungannya. Namun tidak terlepas pula dari stimulus yang mereka terima, latar belakang individu, motivasi, status kepribadian dan sebagainya. Stimulus yang dimaksud di sini adalah penguatan perilaku kreatif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keluarga pengemis melalui bimbingan dan pelatihan yang bersifat *continue*. Bandura (1977) mengemukakan suatu formulasi mengenai perilaku dan sekaligus memberikan informasi bagaimana peran perilaku itu terhadap lingkungan dan terhadap individu atau organisme yang bersangkutan. Bandura menyebutkan dalam teorinya terdapat tiga unsur penting dalam perilaku yaitu *behavior, environment, person*, yang ketiganya saling berhubungan.

Berdasarkan atas teori yang dikemukakan oleh Bandura tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku keluarga pengemis yang tadinya hanya menopang kehidupan ekonominya hanya dengan mengemis kemudian setelah mendapatkan pelatihan dan bimbingan yang diadakan oleh pemerintah dapat merubah perilaku mereka menjadi lebih kreatif dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan kata lain pemerintah harus memfasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan hingga permasalahan benar-benar tuntas serta mampu menciptakan lingkungan yang berbeda dengan sebelumnya.

## SIMPULAN

Model-model penanganan yang diterapkan dalam penanganan pengemis seperti model preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut dirasa masih kurang dalam aplikasi sehingga para pengemis yang terjaring kerap berhenti pada fase tertentu dan masih ada yang kembali ke kebiasaan mengemisnya. Bimbingan lanjut dalam penanganan pengemis

sebenarnya menjadi penentu agar pengemis tidak kembali ke jalan. Bimbingan lanjut yang erat kaitannya dengan penguatan perilaku kreatif merupakan sarana edukatif yang bisa merubah pola hidup para pengemis. Maka dari itu pemerintah perlu menekankan fase bimbingan lanjut tersebut agar keluarga pengemis dapat menopang kebutuhan mereka dengan kreatifitas yang didapat dari bimbingan dan pelatihan yang mereka dapatkan secara *continue*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-muhareb, T. S. A., & Alzyoud, M. S. (2018). *Begging Phenomenon in Jordan : Family Role and Causes*. 12(4). <https://doi.org/10.5539/mas.v12n4p57>
- [2] Balarabe, A. H., & Mahmoud, A. O. (2014). Approaches to Tackling the Menace of Street Begging by Visually Disabled Persons in Northern Nigeria. *Sub-Saharan African Journal of Madicine*, 1(4), 1–7. <https://doi.org/10.4103/2384-5147.144721>
- [3] Esan, O. I. (2009). Panhandlers as Rhetors : Discourse practices of peripatetic beggars in southwestern Nigeria. *California Linguistic Notes*, XXXIV(2), 1–18.
- [4] Baril, G., & Paquette, M.-C. (2014). The sociocultural environment and lifestyle habits of adolescents : a better understanding for action. *Institut National de Santé Publique Du Québec*, 7, 1 online resource (8 pages) :
- [5] Barua, S. (2020). Understanding Coronanomics: The economic implications of the coronavirus (COVID-19) pandemi. *SSRN Elektronik Journal*. <https://ssrn.com/abstract=3566477>
- [6] Eng Koon, O. (2020). The Impact of Sociocultural Influences on the COVID-19 Measures—Reflections From Singapore. *Journal of Pain and Symptom Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.022>
- [7] George, M. (2020). Socio-cultural determinants of the spread of Covid 19. *Health and Primary Care*, 4. <https://doi.org/10.15761/HPC.1000189>
- [8] Hailu, G. (2020). Economic thoughts on COVID-19 for Canadian food processors. *Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne d'agroeconomie*.
- [9] H.A.R. Tilaar. (2002). Pendidikan Kebudayaan dan masyarakat Madani Indonesia. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- [10] <https://www.republika.id/posts/8615/covid-19-dan-kemiskinan>. diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB
- [11] John-Steiner, V., & Mahn, ook. (1996). Sociocultural approaches to learning and development: A Vygotskian framework. In *EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST* (Vol. 31).
- [12] Karacoskun, M. D. (2009). BEGGARY AS A MEANS OF EMOTIONAL EXPLOITATION : A QUALITATIVE INQUIRY INTO THE BEGGARY IN SIVAS. *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, IX(1), 39–49.
- [13] Koentjaraningrat. 1981. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta.
- [14] Laing, T. (2020). The economic impact of the Coronavirus 2019 (Covid-2019): Implications for the mining industry. In *Extractive Industries and Society*. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.04.003>
- [15] Malik, S. (2012). *A Study on Begging : A Social Stigma — An Indian Perspective*. 2(2010). <https://doi.org/10.1177/0971685812454486>
- [16] McKibben, W., & Fernando, R. (2020). Centre for Applied Macroeconomic Analysis The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. *Centre for Applied*

*Macroeconomic Analysis.*

- [17] Nurhadiantomo. 2004. Hukum Reintegrasi Sosial, Konflik-Konflik Sosial Pri-nonPri dan Hukum Keadilan Sosial. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- [18] Nurman Said. 2009. Masyarakat Muslim Makassar: Studi Pola-Pola Integrsi Sosial antara Baju Muslim dengan Muslim Sossorang. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: Jakarta.
- [19] Patel, T. (2017). Some Reflections on the Beggar Problem in Ahmedahad. *Indian Sociological Society*, 8(1), 5-15.
- [20] Seyedalinaghi, S., Ostad, A., Zadeh, T., Zaresefat, H., Hajizadeh, M., & Najmeddin, S. (2013). *Prevalence of HIV infection and the correlates among beggars in Tehran , Iran*. 3(1), 76-78. [https://doi.org/10.1016/S2222-1808\(13\)60017-1](https://doi.org/10.1016/S2222-1808(13)60017-1)
- [21] Shahab, K., 2007. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [22] Stones, C. R. (2013). *A psycho-social exploration of street begging : A qualitative study*. 43(2), 157-167. <https://doi.org/10.1177/0081246313482632>